

Implementasi Kebijakan Pengelolaan Sampah Oleh Dinas Lingkungan Hidup Di Kabupaten Kerinci

Muhammad Aqil Ilham^{1*}, Dinda Syufradian Putra², Suci Rahmadani³, Citra Darminto⁴

^{1,2,3,4} Program Studi Ilmu Pemerintahan, Jurusan Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Fakultas Hukum, Universitas Jambi.

Correspondent email muhammadaqililham2905@gmail.com

Abstrak

Permasalahan sampah di Kabupaten Kerinci semakin kompleks seiring meningkatnya timbulan sampah, keterbatasan sarana dan prasarana, rendahnya partisipasi masyarakat, serta belum optimalnya pelaksanaan kebijakan. Penelitian ini bertujuan menganalisis implementasi kebijakan pengelolaan sampah oleh Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kabupaten Kerinci menggunakan teori implementasi kebijakan Merilee S. Grindle yang menitikberatkan pada *content of policy* dan *context of implementation*. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus. Data diperoleh melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi dengan melibatkan unsur DLH, DPRD, bidang pengelolaan persampahan dan limbah, serta masyarakat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kebijakan telah berjalan dengan dukungan regulasi dan keterlibatan berbagai pemangku kepentingan, tetapi pelaksanaannya belum optimal. Pada dimensi isi kebijakan, kepentingan aktor, manfaat, tujuan perubahan, kedudukan pengambil keputusan, pelaksana, dan sumber daya telah teridentifikasi. Pada dimensi konteks implementasi, terdapat dukungan kelembagaan dan kolaborasi, tetapi masih ditemukan keterbatasan sumber daya manusia, sarana prasarana, anggaran, pemerataan layanan, rendahnya kepatuhan masyarakat, dan belum konsistennya penegakan aturan. Pemerintah daerah merespons melalui pengangkutan sampah, kegiatan kebersihan, edukasi, sosialisasi, pengawasan, serta kerja sama dengan pemerintah kecamatan, desa, sekolah, komunitas, dan sektor swasta. Temuan menunjukkan adanya kesenjangan antara tujuan kebijakan dan kondisi pelaksanaan di lapangan sehingga penguatan kapasitas pemerintah dan partisipasi masyarakat menjadi bagian penting dalam keberlanjutan pengelolaan sampah.

Kata Kunci: implementasi kebijakan, pengelolaan sampah, Dinas Lingkungan Hidup, Kabupaten Kerinci

Abstract

Waste management problems in Kerinci Regency are increasingly complex due to rising waste generation, limited infrastructure, low community participation, and suboptimal policy implementation. This study aims to analyze the implementation of waste management policy by the Kerinci Regency Environmental Agency using Merilee S. Grindle's policy implementation framework, which emphasizes *content of policy* and *context of implementation*. The study employed a qualitative case study approach. Data were collected through interviews, observation, and documentation involving the Environmental Agency, local parliament, waste management officials, and community members. The findings indicate that the policy has been implemented with regulatory support and the involvement of multiple stakeholders, but implementation remains suboptimal. The content of policy dimension shows identifiable interests, benefits, intended changes, decision-making arrangements, program implementers, and resources. The context of implementation dimension shows institutional support and collaboration, while human resources, infrastructure, budget, service coverage, community compliance, and enforcement consistency remain constraints. The local government responds through waste collection, clean-up activities, environmental education, socialization, supervision, and collaboration with subdistricts, villages, schools, communities, and private actors. The findings indicate an implementation gap between policy objectives and field conditions, making institutional capacity and community participation important for sustainable waste management.

Keywords: policy implementation, waste management, Environmental Agency, Kerinci Regency

PENDAHULUAN

Pengelolaan sampah merupakan persoalan tata kelola lingkungan yang tidak hanya berkaitan dengan kegiatan pengangkutan dan pembuangan akhir, tetapi juga menyangkut perilaku masyarakat, kapasitas pemerintah, ketersediaan fasilitas, pembiayaan, koordinasi, serta mekanisme pengawasan.

Dalam konteks kebijakan publik, keberadaan regulasi belum dengan sendirinya menjamin tercapainya tujuan kebijakan. Implementasi menjadi tahap penting karena pada tahap inilah ketentuan yang telah dirumuskan diterjemahkan ke dalam program, pelayanan, tindakan administratif, serta perubahan perilaku sasaran kebijakan.

Penelitian ini mencatat bahwa timbulan sampah di Indonesia pada 2023 mencapai 56,63 juta ton (Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jambi, 2025). Pada tingkat daerah, persoalan pengelolaan sampah juga terlihat melalui keterbatasan infrastruktur, kemampuan pembiayaan, serta partisipasi masyarakat. Kabupaten Kerinci menghadapi persoalan yang sejalan, antara lain ditemukannya tumpukan sampah pada jalan, drainase, permukiman, dan kawasan wisata. Kondisi tersebut memperlihatkan bahwa kebijakan pengelolaan sampah perlu dipahami sebagai proses yang melibatkan hubungan antara pemerintah dan masyarakat, bukan hanya sebagai kegiatan teknis pengangkutan sampah.

Kerangka hukum pengelolaan sampah di daerah bersumber pada Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah dan Peraturan Daerah Kabupaten Kerinci Nomor 9 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Sampah (Mattalatta, 2008). Peraturan daerah tersebut mengarahkan pengelolaan sampah agar dilakukan secara sistematis, menyeluruh, dan berkesinambungan melalui pengurangan dan penanganan sampah, termasuk pemilahan, pengumpulan, pengangkutan, pengolahan, serta pemrosesan akhir. Dengan demikian, implementasi kebijakan membutuhkan kapasitas kelembagaan dan keterlibatan aktor pada berbagai tingkat pemerintahan serta masyarakat.

Sejumlah penelitian yang dirangkum dalam skripsi menunjukkan bahwa pengelolaan sampah dipengaruhi oleh faktor yang beragam. (Ariyanto et al., 2020) menempatkan kebijakan pengelolaan sampah sebagai bagian penting dalam daerah tujuan wisata. (Kakesing et al., 2022) memperlihatkan pentingnya manajemen kelembagaan dalam pengelolaan sampah. (Saputro et al., 2015) menekankan pengelolaan berbasis masyarakat melalui bank sampah, sedangkan (Isni & Mustanginah, 2023) menunjukkan relevansi edukasi dalam meningkatkan pengetahuan pengelolaan sampah. (Nurdin et al., 2024) secara khusus mengkaji peran DLH Kabupaten Kerinci dan menunjukkan bahwa pemberdayaan masyarakat serta pengawasan merupakan bagian penting dalam pengurangan sampah dari sumbernya.

Penelitian ini memusatkan perhatian pada implementasi kebijakan pengelolaan sampah oleh DLH Kabupaten Kerinci. Kerangka Merilee S. Grindle digunakan karena membedakan implementasi ke dalam dua dimensi besar, yaitu isi kebijakan dan konteks implementasi (Malang, 2021). Isi kebijakan mencakup kepentingan yang dipengaruhi, jenis manfaat, derajat perubahan, kedudukan pembuat keputusan, pelaksana program, dan sumber daya. Konteks implementasi mencakup kekuasaan, kepentingan dan strategi aktor, karakteristik lembaga dan penguasa, serta kepatuhan dan daya tanggap. Kerangka tersebut membantu menjelaskan mengapa suatu kebijakan dapat berjalan secara administratif, tetapi belum sepenuhnya menghasilkan perubahan sebagaimana tujuan yang ditetapkan.

Berdasarkan latar belakang tersebut, pertanyaan utama penelitian adalah bagaimana implementasi kebijakan pengelolaan sampah oleh DLH Kabupaten Kerinci serta faktor apa saja yang mendukung dan menghambat pelaksanaannya. Tujuan penelitian adalah mendeskripsikan dan menganalisis implementasi kebijakan berdasarkan sembilan indikator Grindle serta mengidentifikasi dinamika antara regulasi, kapasitas pemerintah, aktor pelaksana, dan masyarakat.

METODE

Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus pada DLH Kabupaten Kerinci. Pemilihan studi kasus dimaksudkan untuk memahami implementasi kebijakan dalam konteks nyata dan memperoleh gambaran yang lebih mendalam mengenai hubungan antara kebijakan dan praktik pelaksanaannya (Rany & Yunita, 2022). Pendekatan kualitatif digunakan karena objek penelitian

berkaitan dengan pengalaman, pandangan, koordinasi, respons, serta perilaku aktor yang terlibat dalam pengelolaan sampah.

Data primer diperoleh melalui wawancara dan observasi, sedangkan data sekunder diperoleh dari dokumen, peraturan, jurnal, buku, dan sumber informasi yang relevan. Informan dipilih secara purposive berdasarkan pengetahuan dan keterlibatan mereka dalam pengelolaan sampah. Informan mencakup unsur DLH, Anggota DPRD Kabupaten Kerinci, perwakilan Bidang Pengelolaan Persampahan dan Limbah, serta masyarakat. Pengumpulan data diarahkan pada sembilan indikator teori Grindle sehingga informasi yang diperoleh dapat dibandingkan antaraktor.

Analisis data dilakukan melalui proses reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Data hasil wawancara dikelompokkan berdasarkan indikator content of policy dan context of implementation. Selanjutnya, temuan dibandingkan dengan kondisi empiris dan konsep implementasi kebijakan. Keabsahan data diperkuat melalui triangulasi sumber dan teknik, yakni membandingkan informasi dari beberapa informan serta memadukan wawancara, observasi, dan dokumentasi (Rany & Yunita, 2022), (Sugiyono, 2020).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil

Gambaran Implementasi Kebijakan Pengelolaan Sampah

DLH Kabupaten Kerinci merupakan aktor utama dalam implementasi kebijakan pengelolaan sampah. Dalam struktur organisasi, bidang pengelolaan persampahan dan limbah menjalankan fungsi pengelolaan persampahan, pengurangan dan penanganan sampah, pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun, serta pembinaan dan pengawasan. Implementasi juga berhubungan dengan unit lain dalam DLH, pemerintah kecamatan dan desa, sekolah, pelaku usaha, komunitas, serta masyarakat.

Temuan penelitian memperlihatkan bahwa implementasi berlangsung melalui kombinasi kegiatan pelayanan dan pemberdayaan. Pelayanan mencakup pengangkutan dan kebersihan, sedangkan pemberdayaan mencakup sosialisasi, edukasi, kerja bakti, program sekolah, pengembangan TPS 3R, dan gagasan penguatan bank sampah. Kegiatan tersebut menunjukkan bahwa pemerintah tidak hanya berupaya menangani sampah setelah dihasilkan, tetapi juga mulai mendorong pengurangan sampah dan perubahan perilaku.

Kerangka Teoritis

Penelitian ini menggunakan teori implementasi kebijakan dari Merilee S. Grindle yang menempatkan keberhasilan implementasi pada dua kelompok variabel. Pertama, content of policy yang melihat isi kebijakan, kepentingan yang dipengaruhi, manfaat yang dihasilkan, tingkat perubahan yang diinginkan, posisi pengambil keputusan, siapa pelaksana program, serta sumber daya yang disediakan. Kedua, context of implementation yang melihat kekuasaan, kepentingan, strategi aktor, karakteristik lembaga dan penguasa, serta kepatuhan dan daya tanggap. Model ini relevan untuk pengelolaan sampah karena persoalan tersebut melibatkan banyak aktor dan memerlukan perubahan perilaku masyarakat selain penyediaan layanan pemerintah.

Dalam penelitian ini, sembilan indikator tersebut digunakan sebagai kerangka membaca data lapangan. Setiap indikator tidak diperlakukan secara terpisah, melainkan dipahami sebagai bagian dari hubungan antaraktor. Misalnya, keterbatasan sarana dapat memengaruhi kemampuan pelaksana memberikan layanan, sedangkan kualitas layanan dan edukasi dapat berhubungan dengan tingkat kepatuhan masyarakat. Dengan pendekatan tersebut, implementasi dipahami sebagai proses yang dinamis dan dipengaruhi kondisi kelembagaan maupun sosial.

PEMBAHASAN

Content of Policy

1. Kepentingan yang Memengaruhi Kebijakan

Kebijakan pengelolaan sampah memengaruhi dan dipengaruhi oleh banyak kelompok. Hasil wawancara menunjukkan keterlibatan pemerintah daerah, DLH, DPRD, kecamatan, desa, sekolah, pelaku usaha, komunitas, dan masyarakat. Masyarakat memiliki posisi penting karena merupakan penghasil sampah sekaligus kelompok sasaran kebijakan. Pemerintah daerah berkepentingan menjaga kebersihan dan kualitas lingkungan, sementara sekolah dan komunitas berperan dalam membangun kebiasaan dan kesadaran lingkungan.

Kepentingan tersebut pada dasarnya bertemu pada kebutuhan menciptakan lingkungan yang bersih, sehat, dan nyaman. Dalam konteks Kerinci sebagai daerah yang memiliki kawasan wisata, kebersihan juga berhubungan dengan kenyamanan pengunjung dan citra wilayah. Temuan ini memperlihatkan bahwa kebijakan persampahan tidak berdiri sendiri, tetapi berkaitan dengan kepentingan kesehatan, lingkungan, sosial, dan ekonomi. Dominasi isu masyarakat dan sampah dalam data wawancara menunjukkan bahwa perilaku sasaran menjadi salah satu faktor penting dalam pelaksanaan kebijakan.

2. Jenis Manfaat yang Dihasilkan

Manfaat kebijakan terlihat pada aspek lingkungan, kesehatan, sosial, dan ekonomi. Dari sisi lingkungan, kegiatan pengangkutan dan kebersihan dapat mengurangi penumpukan sampah pada lokasi tertentu. Kegiatan kurve atau kerja bakti juga berfungsi sebagai sarana membangun kepedulian dan tanggung jawab bersama. Dari sisi kesehatan, pengelolaan yang lebih baik dapat mengurangi potensi pencemaran dan berkembangnya vektor penyakit pada lokasi penumpukan sampah.

Dari sisi ekonomi, sampah dipandang memiliki potensi nilai apabila dikelola secara tepat. Sampah organik dapat diolah menjadi kompos, sedangkan sampah anorganik dapat dikelola melalui bank sampah. Lingkungan yang bersih di kawasan wisata juga dipandang dapat mendukung kenyamanan pengunjung dan peluang ekonomi masyarakat. Namun, manfaat tersebut belum dirasakan secara merata karena masih terdapat wilayah yang menghadapi persoalan pengangkutan, fasilitas, dan perilaku membuang sampah.

3. Derajat Perubahan yang Diinginkan

Perda Kabupaten Kerinci Nomor 9 Tahun 2013 mengarahkan pengurangan timbulan sampah dan pengelolaan yang lebih efektif. Hasil wawancara menunjukkan bahwa perubahan tersebut belum terwujud secara optimal. Rendahnya partisipasi masyarakat, belum terbentuknya budaya pemilahan sampah dari sumber, dan meningkatnya pola konsumsi menjadi faktor yang berpengaruh. Dengan demikian, keberhasilan tidak hanya diukur dari jumlah sampah yang diangkut, tetapi juga dari perubahan perilaku masyarakat.

Pemerintah telah melakukan edukasi, sosialisasi, kegiatan kebersihan, penyebaran konten informasi, serta penguatan program persampahan. Penggunaan media sosial melalui gambar, video, infografis, dan informasi tertulis menjadi bagian dari komunikasi publik. Meski demikian, temuan penelitian menegaskan bahwa sosialisasi saja belum cukup. Perubahan perilaku membutuhkan pendampingan yang berkelanjutan, fasilitas yang memungkinkan masyarakat melakukan pemilahan, dan konsistensi pengawasan.

4. Letak Pengambilan Keputusan

Pemerintah daerah memiliki posisi sentral dalam perumusan dan penetapan kebijakan, sedangkan DLH menjadi perangkat teknis yang menjalankan program. DPRD menjalankan fungsi penganggaran dan pengawasan. Pemerintah kecamatan dan desa membantu pelaksanaan pada tingkat lokal, sementara sekolah, sektor swasta, komunitas, dan masyarakat menjadi aktor pendukung sekaligus sasaran. Temuan wawancara memperlihatkan bahwa pengelolaan sampah dipahami sebagai urusan bersama sehingga pelaksanaan tidak dapat hanya bertumpu pada DLH.

Kejelasan pembagian peran penting untuk menjaga konsistensi dan akuntabilitas. Pemerintah daerah menyediakan arah kebijakan dan sumber daya, DLH menjalankan fungsi teknis, sedangkan aktor lain memperluas jangkauan implementasi. Pola ini menunjukkan adanya kebutuhan koordinasi lintas tingkat pemerintahan dan lintas sektor. Ketika koordinasi tidak berjalan baik, keterbatasan layanan dapat muncul pada wilayah yang jauh dari pusat pelayanan.

5. Siapa Pelaksana Program

Pelaksana program bersifat multipihak. DLH merupakan pelaksana utama pada sisi teknis, tetapi pemerintah desa dan kecamatan, masyarakat, badan usaha, lembaga pendidikan, NGO, pemuda, dan mahasiswa juga disebut sebagai bagian dari pelaksanaan. Badan usaha memiliki kewajiban mengelola limbahnya dan berada dalam pengawasan pemerintah. Sektor swasta juga dapat berkontribusi melalui tanggung jawab sosial perusahaan di lingkungan sekitarnya.

Temuan ini memperlihatkan bahwa kapasitas pelaksanaan tidak hanya ditentukan oleh jumlah petugas pemerintah. Keberhasilan kebijakan juga memerlukan pembagian tanggung jawab pada sumber sampah. Masyarakat berperan dalam mengurangi dan memilah sampah, sedangkan pelaku usaha bertanggung jawab terhadap limbah kegiatan usahanya. Dengan pembagian tersebut, beban implementasi dapat didistribusikan dan tidak seluruhnya berada pada pemerintah.

6. Sumber Daya yang Dikerahkan

Sumber daya implementasi mencakup sumber daya manusia, sarana prasarana, dan anggaran. Sumber daya manusia meliputi petugas kebersihan, sopir, pengangkut, pengawas, serta aparatur yang mengelola program. Infrastruktur mencakup kendaraan pengangkut, TPS 3R, fasilitas pengolahan, dan sarana pendukung lain. Skripsi mencatat empat TPS 3R telah dibangun, tetapi baru satu yang aktif. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa pembangunan fasilitas belum otomatis menghasilkan fungsi pengolahan yang optimal.

Keterbatasan armada dan kebutuhan perawatan kendaraan juga memengaruhi pemerataan pelayanan. Anggaran belum dipandang ideal dan pada periode tertentu menghadapi efisiensi. Keterbatasan tersebut dapat berpengaruh pada frekuensi pengangkutan, jangkauan layanan, dan kemampuan melakukan pengawasan serta edukasi. Dalam perspektif implementasi, sumber daya menjadi penghubung antara keputusan kebijakan dan kemampuan pelaksana menerjemahkannya menjadi layanan nyata.

Context of Implementation

1. Kekuasaan, Kepentingan, dan Strategi Aktor

Dukungan DPRD terlihat melalui fungsi penganggaran dan pengawasan. Pada sisi masyarakat, dukungan terhadap lingkungan bersih secara umum ada, tetapi tingkat partisipasi berbeda-beda. Pemerintah menggunakan strategi berupa sosialisasi, edukasi sekolah, kerja bakti, pengawasan, koordinasi dengan desa dan kecamatan, serta pengembangan fasilitas pengelolaan sampah. Strategi tersebut memperlihatkan bahwa implementasi membutuhkan kombinasi tindakan teknis dan komunikasi publik.

2. Karakteristik Lembaga dan Penguasa

Struktur DLH telah memberikan pembagian fungsi antara bidang pengelolaan persampahan dan limbah, bidang pengendalian dan penataan hukum lingkungan, UPTD, serta kelompok jabatan fungsional. Struktur tersebut menjadi dasar pembagian tugas dalam pelayanan dan pengawasan. Namun,

struktur organisasi belum dengan sendirinya menghilangkan persoalan kapasitas. Kualitas dan kuantitas SDM, kondisi sarana, anggaran, serta luas wilayah tetap menjadi faktor yang menentukan kemampuan lembaga menjangkau seluruh sasaran.

Kapasitas kelembagaan juga terlihat dari kemampuan merespons persoalan yang muncul. Kegiatan pengangkutan, kerja bakti, edukasi, pembinaan, dan penyebaran informasi menunjukkan adanya tindakan aktif. Pada saat yang sama, keterbatasan pemerataan layanan dan konsistensi penegakan aturan memperlihatkan bahwa kapasitas implementasi masih perlu diperkuat. Temuan tersebut sejalan dengan (Nurdin et al., 2024) yang menekankan perlunya optimalisasi peran DLH dalam koordinasi dan pemberdayaan masyarakat.

3. Kepatuhan dan Daya Tanggap

Kepatuhan masyarakat merupakan persoalan yang paling konsisten ditemukan. Sebagian masyarakat telah mengikuti kegiatan kebersihan dan aturan yang tersedia, tetapi masih terdapat perilaku membuang sampah ke sungai, lahan kosong, atau membakar sampah. Kondisi tersebut berinteraksi dengan keterbatasan fasilitas dan pengangkutan. Artinya, kepatuhan tidak dapat dipisahkan dari kualitas layanan dan tersedianya pilihan perilaku yang mudah dilakukan oleh masyarakat.

Daya tanggap DLH terlihat melalui respons terhadap keluhan, pengangkutan, pembinaan, sosialisasi, infografis, dan kegiatan kebersihan. Kegiatan tersebut menunjukkan adanya mekanisme respons pemerintah terhadap masalah lapangan. Namun, respons belum selalu menghasilkan pemerataan pelayanan dan penegakan aturan yang konsisten. Penelitian mengenai sanksi administrasi dalam pengelolaan sampah menegaskan pentingnya pengawasan dan penegakan aturan sebagai bagian dari efektivitas kebijakan (Raharja et al., 2023).

SIMPULAN

Implementasi kebijakan pengelolaan sampah oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kerinci telah berjalan dengan dukungan regulasi, pembagian peran, serta keterlibatan berbagai pemangku kepentingan. Berdasarkan dimensi content of policy, kepentingan aktor, manfaat kebijakan, arah perubahan, kedudukan pengambil keputusan, pelaksana program, dan sumber daya telah dapat diidentifikasi. Pemerintah telah menjalankan pengangkutan, kegiatan kebersihan, sosialisasi, edukasi, pengawasan, dan pengembangan fasilitas pengelolaan sampah.

Namun, target perubahan terutama pengurangan timbulan sampah dan perubahan perilaku masyarakat belum tercapai secara optimal. Hambatan yang ditemukan meliputi rendahnya partisipasi dan kepatuhan masyarakat, belum meratanya budaya pemilahan dari sumber, keterbatasan SDM, sarana prasarana, anggaran, pemerataan pelayanan, serta belum konsistennya penegakan aturan. Dari dimensi context of implementation, dukungan kelembagaan dan kolaborasi telah terlihat, tetapi kemampuan menerjemahkan dukungan tersebut menjadi hasil yang merata masih dipengaruhi kondisi sumber daya dan perilaku sasaran.

Dengan demikian, keberhasilan implementasi kebijakan pengelolaan sampah di Kabupaten Kerinci berkaitan dengan hubungan antara kapasitas pemerintah dan keterlibatan masyarakat. Perbaikan implementasi perlu dilakukan melalui edukasi dan pendampingan berkelanjutan, penguatan sarana dan armada, optimalisasi fasilitas TPS 3R, peningkatan koordinasi lintas aktor, serta pengawasan dan penegakan aturan sesuai ketentuan yang berlaku. Penelitian ini juga memiliki keterbatasan karena hanya berfokus pada Kabupaten Kerinci dan periode tertentu sehingga penelitian lanjutan dapat memperluas lokasi, informan, dan analisis terhadap efektivitas program berbasis masyarakat.

SARAN

Pemerintah Kabupaten Kerinci dan Dinas Lingkungan Hidup perlu memperkuat pengelolaan

sampah dari sumber melalui pemilahan, pengurangan, penggunaan kembali, optimalisasi bank sampah dan TPS 3R, serta pembinaan masyarakat secara berkelanjutan. Sistem pelayanan persampahan juga perlu diperkuat melalui peningkatan sarana dan prasarana, pengaturan pelayanan yang lebih terukur, serta mekanisme pengaduan dan pengawasan yang responsif.

Selain itu, keterlibatan pelaku usaha, khususnya di kawasan wisata, perlu ditingkatkan melalui tanggung jawab pengelolaan sampah dan dukungan terhadap kebersihan lingkungan. Pemerintah bersama DPRD juga perlu mengevaluasi dan memperbarui Peraturan Daerah Kabupaten Kerinci Nomor 9 Tahun 2013 agar sesuai dengan perkembangan dan kebutuhan pengelolaan sampah saat ini, termasuk memperjelas pembagian tanggung jawab, penguatan pemilahan dari sumber, pengawasan, insentif, dan sanksi. Dengan demikian, pengelolaan sampah dapat dilaksanakan secara lebih terpadu melalui keterlibatan pemerintah, masyarakat, sekolah, desa, kecamatan, dan pelaku usaha.

DAFTAR PUSTAKA

- Ariyanto, D. B., Wibowo, A. W., & Fitri, W. Y. (2020). Kebijakan Pengelolaan Sampah Di Daerah Utama Tujuan Wisata. *Jurnal Kebijakan Publik*, 11(2), 105. <https://doi.org/10.31258/jkp.11.2.p.105-112>
- Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jambi. (2025). *PROFIL PENGELOLAAN SAMPAH INDONESIA TAHUN 2023*. Instagram. <https://www.instagram.com/dlh.prov.jambi?igsh=MW52b3Zsb2Y4YXpr>
- Isni, K., & Mustanginah, T. (2023). Pengaruh Edukasi Kesehatan terhadap Peningkatan Pengetahuan Pengelolaan Sampah Sebagai Upaya Mewujudkan Program Bantul Bersih Sampah 2025. *Perilaku Dan Promosi Kesehatan: Indonesian Journal of Health Promotion and Behavior*, 5(1), 35. <https://doi.org/10.47034/ppk.v5i1.6800>
- Kakesing, S. S., Rares, J. J., & Londa, V. Y. (2022). Manajemen Pengelolaan Sampah Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan Kabupaten Sitaro. *Jurnal Administrasi Publik*, 8(2), 115–125.
- Malang, U. M. (2021). *Teori Implementasi Kebijakan Grindle Implementasi*. 167–186.
- Mattalatta, A. (2008). *UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 18 TAHUN 2008 TENTANG PENGELOLAAN SAMPAH*. 76(3), 61–64.
- Nurdin, I., Muchtar, H., Indrawadi, J., & Irwan. (2024). Peran Dinas Lingkungan Hidup (DLH) dalam Pengelolaan Sampah di Kabupaten Kerinci. *Jurnal Edukasi Terkini (JET)*.
- Raharja, I. F., Helmi, & Padilah, N. N. (2023). PENGENAAN SANKSI ADMINISTRASI DALAM PENGELOLAAN SAMPAH RUMAH TANGGA. *MENDAPO Journal of Administration Law*, 4, 271–295.
- Rany, N., & Yunita, J. (2022). Metodologi Penelitian Kualitatif. In *Global Aksara Pers*.
- Saputro, Y. E., Kismartini, & Syafrudin. (2015). Pengelolaan Sampah Berbasis Masyarakat Melalui Bank Sampah. *Indonesian Journal of Conservation*, 4(1), 83–94.
- Sugiyono. (2020). *Metodologi Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R & D*.